

PENGARUH PENERAPAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAH, KOMPETENSI APARATUR DAN PERAN AUDIT INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN

M. Ali Fikri Biana Adha Inapty, RR. Sri Pancawati Martiningsih
Universitas Mataram NTB
bianaadha@gmail.com

Abstract

This study aims to obtain empirical evidence about the effect of applying government accounting standards, competence human resources, and the role of internal audits of the quality of financial reporting information to the internal control system as moderating variable. the population in this study were all civil servants (PNS) in the regional work units (SKPD) Pemprov NTB. Sampling was done by purposive sampling of employees in the process of financial administration, an employee who makes the financial statements and the workers who are the subject of examination APIP of the Inspectorate. Analysis of the data used in this research is regression with moderating variables. the results of this study indicate that the government penewrapan government accounting standards, competency of personnel the role of internal audit had no significant effect on the quality of financial reporting information with the internal control system as moderating variable.

Keywords: *Government Accounting Standards, Competence Apparatus, Internal Audit, Quality Information Financial Statements, Internal Control System.*

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan bukti empiris tentang pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi sumber daya manusia, dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian internal sebagai variabel moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov NTB. Pengambilan sampel dilakukan dengan purposive sampling yaitu pegawai pada bagian proses penatausahaan keuangan, pegawai yang membuat laporan keuangan dan pegawai yang menjadi subjek pemeriksaan APIP dari Inspektorat. Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah regresi dengan variabel moderating. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintahan penewrapan standar akuntansi pemerintah, kompetensi aparatur, peran internal audit memiliki berpengaruh tidak signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan sistem pengendalian intern sebagai variabel moderating.

Kata Kunci: *Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur, Audit Internal, Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Sistem Pengendalian Intern*

Diterima: 28 Desember 2015; Direvisi: 8 Februari 2016; Disetujui: 10 Maret 2016

PENDAHULUAN

Reformasi bidang akuntansi pemerintahan ditandai dengan terbitnya PP No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah. Setelah dikeluarkannya paket Undang-Undang keuangan Negara yaitu UU No.17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU No.1 Tahun 2004 tentang Perbendahraan Negara, UU No.15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan pengelolaan dan Tanggungjawab keuangan Negara, maka informasi keuangan Negara yang meliputi Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah harus dilengkapi dengan informasi Laporan Realisasi APBN/APBD, Neraca, laporan Arus Kas, Catatan atas laporan keuangan. Pelaporan keuangan pemerintah selanjutnya harus mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan seperti yang tertuang dalam PP 24 tahun 2005 ditambah lagi dengan terbitnya Permendagri No.13 Tahun 2006 jo. Permendagri No.59 Tahun 2007 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan daerah, memunculkan tuntutan mengenai perlunya pemahaman teoritis dan praktis pada akuntansi keuangan daerah dan standar akuntansi pemerintahan, sebagai kunci dari pengelolaan keuangan daerah yang sehat (Afiah, 2009).

Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang benar dan pemahaman yang baik terhadap akuntansi keuangan daerah oleh pengelola keuangan pada Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan. Penelitian mengenai Standar Akuntansi Pemerintahan telah dilakukan oleh Nugraheni dan Subaweh (2008) serta Kusumah (2012). Nugraheni dan Subaweh (2008) dalam penelitiannya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP, pengetahuan pengelola UAPPA EI dan UAPPB dan ketersediaan sarana dan prasarana di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan. Demikian pula penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan.

Pengelolaan keuangan daerah yang sehat dalam rangka menciptakan good governance juga harus diikuti dengan sumberdaya aparatur yang kompeten. Namun sudah menjadi permasalahan umum diinstansi pemerintah daerah bahwa untuk penataan personil, seringkali dilakukan tidak sesuai dengan kebutuhan baik secara

kuantitas maupun kualitas (cakap). Dari aspek kualitas penataan personil yang dilakukan kerap kali tidak mengikuti prinsip “the right man on the right place” . Hal ini sangat berkaitan dengan pengembangan organisasi yang hanya mempertimbangkan kewenangan sementara kualitas sumberdaya aparatur yang ada belum memenuhi kompetensi yang seharusnya dipenuhi (Aruan, 2003). Kemampuan sumber daya manusia yang kompeten terhadap pengelolaan keuangan tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya.

Penelitian mengenai kompetensi aparatur (SDM) telah dilakukan oleh Indriasari dan Nahartyo (2008) dalam Sukmaningrum (2012), yang hasilnya menunjukkan bahwa kapasitas sumber daya manusia, tidak mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah secara signifikan, sedangkan pemanfaatan teknologi informasi dan pengendalian intern akuntansi mempengaruhi nilai informasi pelaporan keuangan pemerintah daerah. Hasil yang sama ditunjukkan oleh Sukmaningrum (2012) bahwa kompetensi Sumberdaya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Sedangkan hasil yang berbeda ditunjukkan oleh Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) dalam Sukmaningrum (2012) menunjukkan sumber daya manusia berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah, tetapi tidak signifikan terhadap ketepatanwaktuan. Sedangkan pemanfaatan TI berpengaruh positif signifikan terhadap keterandalan pelaporan dan ketepatanwaktuan.

Keuangan Negara wajib dikelola oleh aparatur negara yang kompeten secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggungjawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan sebagai satu prasyarat untuk mendukung keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Negara. Untuk mencapai hal tersebut maka suatu instansi juga membutuhkan suatu sistem pengendalian intern yang kuat serta peran dari audit intern untuk mencapai tujuan suatu organisasi (Wakhyudi, 2005). Dengan dukungan system pengendalian intern yang kuat tentunya akan meningkatkan kualitas laporan keuangan SKPD. Sistem pengendalian intern adalah proses yang integral pada

tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. Sedangkan peran audit internal tentunya mengawasi dan mengevaluasi prosedur, kebijakan dan laporan keuangan yang sudah dihasilkan suatu instansi, agar pengelolaan keuangan berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh Sari dan Raharja (2011) namun menguji pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme Good Corporate Governance, hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG. Nugraha dan Susanti (2010) dalam Sukmaningrum (2012) meneliti penelitian pengaruh system pengendalian internal terhadap reliabilitas laporan keuangan pemerintah daerah. Hasil penelitiannya menyatakan sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap keandalan laporan keuangan. Hasil penelitian Nugraha dan Susanti (2010) sejalan dengan penelitian Sukmaningrum (2012) yang menunjukkan bahwa system pengendalian intern berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Berdasarkan pemaparan diatas maka motivasi dilakukannya penelitian ini adalah karena 1). masih adanya kesenjangan (research gap) pada penelitian sebelumnya; 2). Penelitian ini mengambil lokasi pada SKPD di Prov. NTB karena Predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk tahun anggaran 2011 yang didapat oleh Pemprov NTB atas Laporan Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK RI, yang merupakan lompatan besar, mengingat hasil pemeriksaan BPK RI terhadap Laporan keuangan tahun Anggaran 2010 adalah tidak menyatakan pendapat (disclaimer) yang merupakan predikat terendah hasil pemeriksaan keuangan yang disandang oleh suatu daerah, padahal tahun 2009 opini LHP Pemprov NTB oleh BPK RI adalah wajar dengan pengecualian. Disclaimer tahun 2010 yang diberikan BPK RI atas LHP Pemprov NTB disebabkan karena ketidaksesuaian penyajian dengan Standar Akuntansi Pemerintah (SAP), kelemahan pengendalian intern, ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan serta ketidakcukupan pengungkapan

laporan keuangan (Pidato anggota BPK RI atas LHP Pemprov NTB, 2010, <http://www.mataram.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2011>).

Motivasi-motivasi tersebut menjadi topic yang menarik untuk diteliti, artinya bagaimana peran dari audit internal, kompetensi aparatur, penerapan SAP, system pengendalian intern mengalami perubahan kearah yang lebih baik. Penelitian ini terinspirasi dari penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012); Nugraheni & Subaweh (2008); Kusumah (2012) serta Sari & Raharja (2011). Tujuan dari penelitian ini adalah pertama, untuk memberikan bukti empiris penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal mempengaruhi kualitas informasi laporan keuangan pada SKPD; Kedua, untuk memberikan bukti empiris tentang system pengendalian intern dalam memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan

KERANGKA TEORITIS DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Teori Kegunaan Informasi (Decision-Usefulness Theory)

Staubus (2000) dalam Kiswara (2011) menyatakan teori kegunaan keputusan (decision- usefulness theory) informasi akuntansi menjadi referensi dari penyusunan kerangka konseptual Financial Accounting Standard Boards (FASB), yaitu Statement of Financial Accounting Concepts (SFAC) yang berlaku di Amerika Serikat. Kegunaan keputusan informasi akuntansi mengandung komponen-komponen yang perlu dipertimbangkan oleh para penyaji informasi akuntansi agar cakupan yang ada dapat memenuhi kebutuhan para pengambil keputusan yang akan menggunakannya.

Standar Akuntansi Pemerintahan

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005) dalam Kusumah (2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan yang digunakan saat ini oleh instansi pemerintah dikuatkan dalam PP No.24 Tahun 2005, SAP ini mengatur tentang penyajian laporan keuangan.

PP No.24 tahun 2005 adalah SAP Berbasis Kas Menuju Akrual yaitu SAP yang mengakui pendapatan, belanja, dan pembiayaan berbasis kas, serta mengakui aset,

utang, dan ekuitas dana berbasis akrual. Laporan keuangan pokok terdiri dari: (a) Laporan Realisasi Anggaran; (b) Neraca; (c) Laporan Arus Kas; (d) Catatan atas Laporan Keuangan. Selain laporan keuangan pokok tersebut, entitas pelaporan diperkenankan menyajikan Laporan Kinerja Keuangan dan Laporan Perubahan Ekuitas (Zeyn, 2011). Penelitian ini belum menggunakan PP No.71/2010 tentang SAP karena masih dalam tahap sosialisasi dan belum diimplementasikan.

Kompetensi Aparatur

Kompetensi diartikan sebagai kemampuan dasar dan kualitas kerja yang diperlukan untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik (Furham, 1990 dalam Aruan, 2003). Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya, Aruan (2003).

Peran Audit Internal

Berkaitan dengan pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, dalam pasal 9 ayat (1) UU Nomor 15 Tahun 2004 disebutkan bahwa: "Dalam menyelenggarakan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara, BPK dapat memanfaatkan hasil pemeriksaan aparat pengawasan intern pemerintah." Peran dan fungsi audit internal termasuk unsur yang penting dalam sistem pengendalian organisasi yang memadai.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Peraturan Pemerintah No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) menjelaskan karakteristik kualitatif laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya. Keempat karakteristik kualitatif yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dapat dipahami merupakan prasyarat normatif yang diperlukan agar laporan keuangan pemerintah dapat memenuhi kualitas yang dikehendaki.

Sistem Pengendalian Intern

PP Nomor 60 Tahun 2008 mendefinisikan pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan

pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. SPI merupakan kegiatan pengendalian terutama atas pengelolaan system informasi yang bertujuan untuk memastikan akurasi dan kelengkapan informasi.

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Definisi Standar Akuntansi Pemerintahan menurut Bastian (2005:134) dalam Kusumah (2012), selanjutnya disebut SAP, adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah. Jika pemerintah menyusun laporan keuangan berdasarkan prinsip-prinsip SAP maka kualitas informasi keuangan menjadi semakin baik. Penelitian mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan telah dilakukan oleh Kusumah (2012); Nugraheni dan Subaweh (2008). Hasil penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada SKPD/OPD Pemerintah Kota Tasikmalaya masuk kategori baik dan terdapat pengaruh antara penerapan SAP terhadap kualitas laporan keuangan. Demikian juga hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan terdapat pengaruh penerapan SAP di Inspektorat Jenderal Departemen Pendidikan Nasional terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesa yang dapat dirumuskan adalah sebagai berikut:

H1: Penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Pengaruh Kompetensi Aparatur Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Guy et al. (2002) dalam Sukmaningrum (2012), menyatakan bahwa kompetensi adalah pengetahuan dan keahlian yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas. Kompetensi aparatur pemerintah daerah berarti kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa pengetahuan, ketrampilan, sikap dan perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya. Kompetensi aparatur (SDM) yang memadai

dari segi kuantitas dan kualitas akan meningkatkan kandungan nilai informasi dalam pelaporan keuangan PEMDA.

Indriasari (2008) dalam Sukmaningrum (2012) membuktikan dalam penelitian bahwa kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah di Kota Palembang dan Kabupaten Ogan Hilir provinsi Sumatera Selatan. Bukti penelitian ini didukung oleh hasil penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) namun berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sukmaningrum (2012).

Berdasarkan uraian diatas, sehingga hipotesa yang dibangun adalah sebagai berikut:

H2: Kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Pengaruh Peran Audit Internal Terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Internal auditor merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG yang pada saat ini telah berkembang menjadi komponen utama dalam meningkatkan instansi secara efektif dan efisien. Dengan semakin baiknya proses kegiatan pengawasan atau rewiuw yang dilakukan oleh peran auditor internal (APIP) ke instansi-instansi pemerintah tentunya akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan Pemda. Penelitian mengenai peran audit internal telah dilakukan oleh Sari dan Raharja (2011) hasilnya menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG. Sedangkan penelitian tentang pengaruh peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan belum banyak dilakukan.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesis yang dirumuskan adalah:

H3: Peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan

Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Kompetensi Aparatur dan Peran Audit Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan dengan Sistem pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating

Sistem pengendalian intern merupakan prasyarat bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pengelolaan keuangan negara yang amanah. Karena dengan SPI yang baik maka suatu organisasi akan dapat berjalan dengan baik. Sistem pengendalian intern yang baik tentunya tidak akan berguna jika tidak didukung dengan sumber daya aparatur yang kompeten, fungsi audit internal yang baik serta penerapan standar akuntansi didalam penyelenggaraan keuangan dalam menghasilkan laporan keuangan. Dengan demikian adanya penerapan SAP, aparatur yang kompeten, fungsi audit internal yang baik serta diperkuat dengan system pengendalian intern yang memadai maka akan menghasilkan keluaran berupa kualitas informasi laporan keuangan yang baik pula untuk menjadi masukan bagi pihak auditor eksternal, eksekutif dan legislatif dalam memperbaiki pengelolaan pertanggungjawaban keuangan negara pada waktu yang akan datang.

Penelitian dengan menempatkan system pengendalian intern sebagai pemoderasi atas pengaruh penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan belum pernah dilakukan, sehingga peneliti mencoba menguji hal tersebut berdasarkan asumsi yang sudah dipaparkan diatas. Namun system pengendalian intern sebagai variable independen terhadap kualitas informasi laporan keuangan telah dilakukan oleh Sukmaningrum (2012); Nugraha dan Susanti (2010), yang hasilnya menunjukkan adanya pengaruh.

Berdasarkan penjelasan diatas maka hipotesa yang dirumuskan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

H4: Sistem pengendalian intern memoderasi pengaruh penerapan SAP, kompetensi aparatur dan fungsi audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan

METODE

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian survey (*survey research*) yang berupa penjelasan dan pengujian hipotesa (*explanatory*) yang menggunakan metode deskriptif dan eksploratori karena inti pembahasannya adalah pertanyaan-pertanyaan tentang penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan dengan system pengendalian

intern sebagai variable moderating. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh pegawai negeri sipil (PNS) di Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Pemprov.NTB. Pengambilan sampel dilakukan dengan menggunakan non probability sampling (purposive sampling). Kriteria sampel adalah 1). Pegawai pada bagian proses penatausahaan khususnya keuangan; 2). Pegawai yang membuat laporan keuangan; 3). pegawai yang menjadi subjek pemeriksaan APIP dari Inspektorat.

Variable-variabel yang digunakan dalam penelitian ini dapat diidentifikasi sebagai berikut: Variabel Independen dalam penelitian ini adalah penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP); kompetensi Aparatur; peran audit internal. Variabel dependen dalam penelitian ini adalah Kualitas Informasi Laporan keuangan. Variable moderating adalah variable independen yang akan memperkuat atau memperlemah hubungan antara variable independen lainnya terhadap variable dependen (Ghozali, 2005). Variable moderating dalam penelitian ini adalah sistem pengendalian intern. Definisi operasional dan pengukuran variabel yang digunakan dalam penelitian ini yaitu:

1. Penerapan standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah (Bastian,2005 dalam Kusumah, 2012). Kuesioner penerapan SAP dikembangkan oleh peneliti berdasarkan PP No.24 Tahun 2005. Penerapan SAP terdiri dari 12 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point.
2. Kompetensi aparatur adalah kemampuan yang harus dimiliki seseorang aparatur berupa landasan kepribadian, kemampuan berkarya, pengetahuan & ketrampilan, sikap dan perilaku serta pemahaman kaidah kehidupan bermasyarakat yang diperlukan dalam pelaksanaan tugasnya (Mendiknas,2002 dalam Aruan 2003). Kompetensi aparatur diadaptasi dari Aruan (2003) namun juga dimodifikasi oleh peneliti. Kompetensi aparatur terdiri dari 23 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point.
3. Peran audit internal adalah pemeriksa yang berperan dalam mengawasi, mengevaluasi suatu sistem akuntansi serta menilai kebijakan pemerintah yang dilaksanakan oleh suatu Instansi. Peran audit internal dikembangkan oleh peneliti, terdiri dari 9 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point

4. Kualitas informasi laporan keuangan adalah ukuran-ukuran normatif yang perlu diwujudkan dalam informasi akuntansi sehingga dapat memenuhi tujuannya (PP No.24 Tahun 2005). Kualitas informasi laporan keuangan dikembangkan berdasarkan PP no.24 tahun 2005. Kualitas informasi laporan keuangan terdiri dari 10 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point.
5. Sistem Pengendalian intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan (PP No.60 Tahun 2008). Pertanyaan pada sistem pengendalian intern sebagian besar diadaptasi dari PP No. 60 tahun 2008. Sistem Pengendalian intern terdiri dari 23 pertanyaan dengan menggunakan skala likert 4 point.

Persamaan matematis pada penelitian ini adalah sebagai berikut:

$$\text{KILP} = a + b_1\text{PSAP} + b_2\text{KP} + b_3\text{PAI} + b_4\text{SPI} + b_5\text{PSAP.SPI} + b_6\text{KP.SPI} + b_7\text{PAI.SPI} + e$$

Keterangan:

KILP = Kualitas informasi laporan keuangan

PSAP = Penerapan standar akuntansi pemerintahan

KP = Kompetensi aparatur

PAI = Peran audit internal

PSAP.SPI = Interaksi antara penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan sistem pengendalian intern

KP.SPI = Interaksi antara kompetensi aparatur dengan sistem pengendalian intern

PAI.SPI = Interaksi antara peran audit intern dengan sistem pengendalian intern

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hipotesis pertama menyatakan penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 0.358 dengan signifikansi sebesar 0.723 ($\geq 10\%$)

yang berarti penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan (KILP). Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian sebelumnya mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan terhadap kualitas laporan keuangan, seperti Kusumah (2012) dan Nugraheni dan Subaweh (2008), di mana hasil penelitian Kusumah (2012) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan dan kualitas laporan keuangan pada Pemerintah Kota dipengaruhi oleh penerapan SAP. Demikian juga hasil penelitian Nugraheni dan Subaweh (2008) menunjukkan bahwa terdapat pengaruh penerapan SAP terhadap peningkatan kualitas laporan keuangan.

Hipotesis kedua menyatakan kompetensi aparatur berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar 1.106 dengan signifikansi sebesar 0.227 ($\geq 10\%$) yang berarti Kompetensi Aparatur (KP) tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan (KILP). Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung hasil penelitian terdahulu seperti Indriasari (2008) dalam Sukmaningrum (2012) membuktikan kapasitas sumberdaya berpengaruh terhadap keterpautan dan keterandalan informasi laporan keuangan pemerintah daerah dan penelitian Winidyaningrum dan Rahmawati (2010) yang menyatakan bahwa kapasitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap keterandalan pelaporan keuangan pemerintah daerah. Namun demikian hasil penelitian ini mendukung hasil penelitian Sukmaningrum (2012) yang menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Hipotesis ketiga menyatakan Peran audit internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian menunjukkan nilai t hitung sebesar -1.406 dengan signifikansi sebesar 0.169 ($\geq 10\%$) yang berarti peran audit internal (PAI) tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan (KILP). Temuan penelitian ini tidak mendukung hipotesis yang diajukan sebelumnya. Hasil penelitian ini tidak mendukung penelitian sebelumnya, yaitu hasil penelitian Sari

dan Raharja (2011) yang menunjukkan bahwa terdapat pengaruh peran audit internal terhadap mekanisme GCG.

Hipotesis keempat menyatakan sistem pengendalian internal memoderasi pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur dan fungsi audit internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Hasil penelitian berturut turut menunjukkan nilai t hitung untuk moderasi penerapan standar akuntansi pemerintahan dengan moderasi sistem pengendalian internal (PSAP*SPI) sebesar 0.382 dengan signifikansi sebesar 0.705 ($\geq 10\%$); kompetensi aparatur yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal (KP*SPI) sebesar -0.240 dengan signifikansi sebesar 0.812 ($\geq 10\%$); dan peran audit internal yang dimoderasi oleh sistem pengendalian internal (PAI*SPI) sebesar 0.058 dengan signifikansi sebesar 0.953 ($\geq 10\%$). Temuan ini memberikan hasil bahwa seluruh sistem pengendalian internal tidak dapat memoderasi penerapan standar akuntansi pemerintah (PSAP) kompetensi aparatur, dan peran pengendalian internal.

Seluruh temuan penelitian di atas menolak teori yang menyatakan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP), kompetensi aparatur (KP), peran audit internal (PAI), dan peran sistem pengendalian intern (SPI) tidak mendukung kualitas laporan keuangan (KILP). Simpulan akhir penelitian ini berdasarkan jawaban responden karena yaitu penerapan standar akuntansi pemerintahan (PSAP) masih belum maksimal dilakukan. Hal ini dikarenakan kompetensi aparatur yang minimal. Temuan ini juga diperkuat berdasarkan hasil survey di lokasi yang memberikan gambaran banyaknya pengelola keuangan yang bukan berlatar belakang pendidikan akuntansi, pemahaman tentang standar akuntansi pemerintahan yang baru masih belum mapan dan peran pembinaan melalui audit internal yang kurang (belum independen). Hasil penggunaan variabel moderasi yang menunjukkan tidak adanya pengaruh juga memberikan simpulan kurang efektifnya sistem pengendalian internal pada pemerintah (SKPD di Provinsi NTB). Selanjutnya temuan penelitian juga menolak teori sebagaimana dijelaskan dalam dalam Standar Profesi Akuntan Internal yang dikeluarkan oleh Konsorsium Organisasi Profesi Audit Internal (2004) yang menyatakan dalam upaya mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) entitas memerlukan peran internal audit yang bertugas meneliti, mengevaluasi suatu sistem

akuntansi serta menilai kebijakan manajemen yang dilaksanakan, di mana Internal auditor merupakan salah satu profesi yang menunjang terwujudnya GCG. Keberadaan internal auditor diharapkan dapat memberikan nilai tambah bagi organisasi sebagai fungsi yang independen, menciptakan sikap professional dalam setiap aktivitasnya. Internal auditor sangat dituntut akan kemampuannya memberikan jasa yang terbaik dan sesuai dengan yang dibutuhkan oleh suatu organisasi (Sari dan Raharja,2011).

SIMPULAN

Penelitian ini mencoba memberikan bukti empiris mengenai pengaruh penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal, kualitas laporan keuangan dan system pengendalian terhadap kualitas informasi laporan keuangan. Adapun hasil temuan dalam penelitian ini menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan, kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Impikasi dari temuan penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi secara empiris sebagai bahan pembelajaran tentang gambaran penerapan SAP, kompetensi aparatur, peran audit internal, kualitas informasi laporan keuangan dan system pengendalian intern yang dilaksanakan pada SKPD. Serta dapat digunakan sebagai acuan untuk penelitian penelitian selanjutnya dan bagi pembuat keputusan sebagai bahan informasi dan pertimbangan dalam menetapkan kebijakan terkait dengan pengelolaan keuangannya dengan memperhatikan berbagai faktor pembentuk keberhasilan kualitas informasi laporan keuangan seperti penerapan SAP, Kompetensi aparatur, peran audit internal dan sistem pengendalian internnya sehingga tercipta laporan keuangan yang akuntabel dan transparan.

Namun demikian, terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, yaitu: pertama sampel yang digunakan hanya pada SKPD di Provinsi NTB sehingga hasil temuan tidak dapat digeneralisasi di wilayah lain. Kedua, hasil pengumpulan data diperoleh hanya berjumlah 40 orang responden dikarenakan keterbatasan waktu penelitian sehingga belum dapat sepenuhnya mencerminkan seluruh keadaan di

lapangan. Disarankan bagi penelitian selanjutnya untuk mencoba menggunakan sampel lebih luas (misalnya pada SKPD Provinsi lain) dengan jumlah responden lebih banyak untuk dapat memberikan gambaran yang lebih utuh mengenai pengelolaan keuangan di SKPD. Pemerintah provinsi NTB disarankan juga untuk dapat meningkatkan kompetensi aparatur melalui pemberian pendidikan dan pelatihan dan menempatkan aparatur yang tepat pada bidang pengelolaan keuangan.

PUSTAKA ACUAN

- Afiah N. N, (2009). “ *Akuntansi Pemerintahan: Implementasi Akuntansi keuangan pemerintah Daerah*” . Edisi Pertama Cetakan Ke-I, Penerbit Prenada Media Group Jakarta.
- Aruan N, (2003). “ *Kompetensi Aparatur Pemerintah Daerah Studi Empiris di Jawa Timur*”.
- Penerbit Badan Penelitian dan Pengembangan Propinsi Jawa Timur. ISBN: 979 – 682– 672 – 0.
- Ghozali I, (2005). “ *Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS* “. Edisi 3, ISBN:979.704.015.1, Badan Penerbit – Undip.
- <http://www.mataram.bpk.go.id/web/wp-content/uploads/2011> ” (Pidato anggota BPK RI atas LHP Pemprov NTB, 2010)”.
- Kiswara .E,(2011). “ *Nilai Relevan dan Reliabilitas Kegunaan Keputusan Informasi Akuntansi Menurut SFAC No.2 Dalam Penyajian Laporan Keuangan dengan Metode-Metode Pembebanan Pajak Penghasilan Berbeda*. Disertasi Undip, dipublikasi.
- Kusumah A.A, (2012). “ *Pengaruh penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Kualitas Laporan Keuangan (Survei pada SKPD/OPD Pemerintahan Kota Tasikmalaya)*.
- Nugraha D.S.dan Susanti. A, (2010). “ *The Influence of Internal Control System to The Reliability of Local Government Financial Statement (Case Study at Pemerintah Provinsi Jawa Barat)*. Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akuntansi. Vol.2 No.2.

- Nugraheni P dan Subaweh I, (2008). “ *Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan* “. Jurnal Ekonomi Bisnis No.1 Vol 13, April 2008.
- Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 2005 tentang “Standar Akuntansi Pemerintahan”
- Peraturan Pemerintah No.60 Tahun 2008 tentang “Sistem Pengendalian Intern Pemerintah”
- Sekaran, U (2003). “ *Research Methods for Business: A Skill Building* ”.
- Sari P.M dan Raharja, (2011). “ *Peran Audit Internal Dalam Upaya Mewujudkan Good Corporate Governance (GCG) Pada Badan Layanan Umum (BLU) di Indonesia* ”
- Sugiyono (2007). “ *Metode Penelitian Pendekatan Kuantitatif, kualitatif, dan R & D*” Penerbit Alfabeta.
- Sukmaningrum T, (2012). “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada pemerintah Kabupaten dan Kota Semarang)*. Skripsi dipublikasi.
- Sugiyono, (2007). “*Metode Penelitian Bisnis*”. CV. Alfabeta. Bandung.
- Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2014 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan negara
- Wakhyudi, (2005). “*Pemberdayaan Peran Audit Internal Dalam Mewujudkan Good Governance Pada Sektor Publik* “.
- Winindyaningrum, C dan Rahmawati. (2010). “ *Pengaruh Sumber Daya Manusia dan Pemanfaatan Teknologi Informasi Terhadap Keterandalan dan Ketepatanwaktuan Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah dengan Variabel Intervening Pengendalian Intern Akuntansi (Studi Empiris di Pemda Subosukawonosraten)*,” dalam Simposium Nasional Akuntansi XIII. 13-14 Oktober. Purwokerto.
- Zeyn. E, (2011). “*Pengaruh Good Governance dan Standar Akuntansi Pemerintahan terhadap Akuntabilitas Keuangan dengan Komitmen Organisasi Sebagai Pemoderasi*”. Jurnal Reviu Akuntansi dan Keuangan, ISSN:2088-0685 Vol.1. No.1. April 2011, P.21-37.